



**SUMBER BERITA**

**RABU, 31 OKTOBER 2018**

X	RAKYAT BENGKULU	MEDIA INDONESIA
	BENGKULU EKSPRESS	KOMPAS
	RADAR BENGKULU	.....

**KATEGORI BERITA UNTUK BPK**

POSITIF  NETRAL  BAHAN PEMERIKSAAN  PERHATIAN KHUSUS

**Tetapkan Tsk Korupsi DD / ADD Maras Bantan**

**Mengarah ke  
Mantan Kades**

**SELUMA** - Penyidik Tipidkor Sat Reskrim Polres Seluma memastikan tersangka (tsk) korupsi Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) tahun 2016 Desa Maras Bantan, segera ditetapkan. Bila tak ada kendala, awal November sudah dilakukan penetapan, atau usai diterimanya hasil audit dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Bengkulu.

"Informasi yang kami terima, hasil audit BPKP Bengkulu keluar awal bulan ini. Jadi setelah hasil audit terkait besaran kerugian negara

tersebut kami terima, langsung kita lakukan penetapan tsk," tegas Kapolres Seluma AKBP. I Nyoman Merta Dana melalui Kasat Reskrim AKP. Rizka Fadilah, SH, S.Ik.

Dari hasil pemeriksaan terhadap saksi yakni mantan bendahara desa yang lama, Eko Sipto (29) dan bendahara baru, Rukilah (32) serta pemeriksaan Kaur Kesra Tetan (27) dan Kaur Pemerintahan, Dukiman (51) ditemukan indikasi penyimpangan DD/ADD sebesar Rp 300 juta. "Kami juga telah memeriksa mantan Kades Maras Bantan MZ. Hasil pemeriksaan saksi-saksi ini sebagai data pembandingan untuk audit investigasi yang dilakukan BPKP. Jadi nilai kerugian

negara yang dipakai nantinya yakni hasil audit BPKP bukan hasil audit Inspektorat Seluma atau hasil estimasi penyidik. Namun bisa saja nanti besaran kerugian negaranya sama," terang Kasat Reskrim.

Dalam penetapan tersangka yang mengarah ke mantan kades itu, penyidikan yang dilakukan Sat Reskrim tak akan berhenti pada satu orang. Ada sejumlah nama lainnya yang berpeluang terseret sebagai tersangka. "Untuk tahap awal baru satu tsk. Berikutnya kita kembangkan untuk mendapati tsk lainnya bila memang ada bukti-bukti kuat mengarah kepada keterlibatan pihak lainnya," pungkasnya.

Sekadar mengingatkan dugaan penyimpangan DD/ADD Maras Bantan Kecamatan Semidang Alas Maras tahun 2016 terjadi saat kades dijabat MZ. Alokasi DD/ADD tahun 2016 tersebut sebesar Rp 927,5 juta. Dugaan penyimpangan terjadi pada realisasi pembangunan fisik gorong-gorong, tapal batas desa, peningkatan gedung PAUD (tidak dilaksanakan alias fiktif) karena gedung atau bangunan tersebut sebelumnya telah ada. Selain itu honor perangkat desa juga tidak dibayarkan sehingga ada dana sebesar Rp 300 juta tidak dapat di pertanggungjawabkan oleh MZ sebagaimana audit Inspektorat Seluma. (aba)